



**KEPALA DESA JATILUHUR
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA JATILUHUR
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DESA : JATILUHUR

KECAMATAN : ROWOKELE

KABUPATEN : KEBUMEN



**KEPALA DESA JATILUHUR
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA JATILUHUR
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATILUHUR**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa harus dipertanggungjawabkan melalui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UndangpUndang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disaese 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2) dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67);
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
34. Peraturan Desa Jatiluhur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 ;
35. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabekelan;
36. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun Anggaran 2020;
37. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);
 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 54);
 3. Keputusan Camat Rowokele Nomor ; 142/3/KEP/2021 Tanggal 27 Januari 2021 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILUHUR
dan
KEPALA DESA JATILUHUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JATILUHUR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan	Rp.	1.239.898.800,00	1.229.096.164,00
2. Belanja	Rp.	1.270.019.967,00	1.250.889.572,00
Surplus/Devisit	Rp.	(30.121.167,00)	(21.793.409,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	30.121.167,00	30.121.167,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	30.121.167,00	30.121.167,00
Silpa		0,00	8.327.759,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020, Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2020, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Berita acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

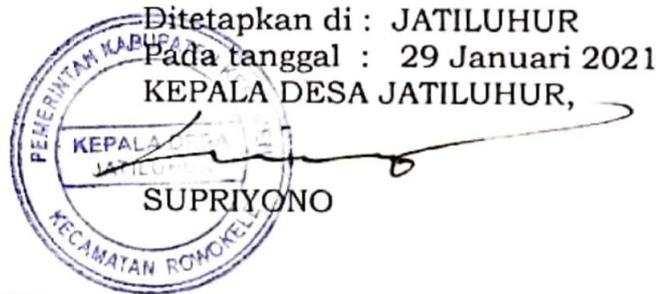
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas :
 1. Laporan Realisasi APBDes; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatiluhur.



Diundangkan di : JATILUHUR
Pada tanggal : 29 Januari 2020
SEKRETARIS DESA JATILUHUR



WAKHYUDI
LEMBARAN DESA JATILUHUR NOMOR 1 TAHUN 2021

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA JATILUHUR
KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.227.498.800,00	1.227.498.800,00	0,00
Dana Desa	863.320.000,00	863.320.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.164.500,00	30.164.500,00	0,00
Alokasi Dana Desa	313.958.300,00	313.958.300,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	15.056.000,00	15.056.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	7.400.000,00	1.597.364,00	5.802.636,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.239.898.800,00	1.229.096.164,00	10.802.636,00
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	407.640.667,00	403.178.272,00	4.462.395,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	539.372.000,00	537.104.000,00	2.268.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	58.304.000,00	45.904.000,00	12.400.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	264.703.300,00	264.703.300,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.270.019.967,00	1.250.889.572,00	19.130.395,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(30.121.167,00)	(21.793.408,00)	(8.327.759,00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	30.121.167,00	30.121.167,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC	30.121.167,00	30.121.167,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	8.327.759,00	(8.327.759,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JATILUHUR
 TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.227.498.800,00	1.227.498.800,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	863.320.000,00	863.320.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.164.500,00	30.164.500,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	313.958.300,00	313.958.300,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	15.056.000,00	15.056.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.400.000,00	1.597.364,00	5.802.636,00
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank	1.400.000,00	1.597.364,00	(197.364,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.239.898.800,00	1.229.096.164,00	10.802.636,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	288.442.700,00	287.632.700,00	810.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	217.750.000,00	217.750.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.732.700,00	23.922.700,00	810.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.230.967,00	240.178.572,00	16.052.395,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	104.754.967,00	103.159.100,00	1.595.867,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	73.312.000,00	73.012.000,00	300.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	19.900.000,00	7.500.000,00	12.400.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.049.000,00	6.292.472,00	756.528,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	12.455.000,00	11.455.000,00	1.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	24.930.000,00	24.930.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	460.643.000,00	458.375.000,00	2.268.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	395.100.000,00	395.100.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	47.543.000,00	45.275.000,00	2.268.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	264.703.300,00	264.703.300,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	264.703.300,00	264.703.300,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.270.019.967,00	1.250.889.572,00	19.130.395,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.121.167,00)	(21.793.408,00)	(8.327.759,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.121.167,00	30.121.167,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.121.167,00	30.121.167,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	30.121.167,00	30.121.167,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	8.327.759,00	(8.327.759,00)



25 Januari 2021

KEPALA DESA

KEPALA DESA
JATILUHUR

SUPRIYONO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATILUHUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.227.498.800,00	1.227.498.800,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	863.320.000,00	863.320.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	863.320.000,00	863.320.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.164.500,00	30.164.500,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	30.164.500,00	30.164.500,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	313.958.300,00	313.958.300,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	313.958.300,00	313.958.300,00	0,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	15.056.000,00	15.056.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	15.056.000,00	15.056.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.400.000,00	1.597.364,00	5.802.636,00
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	4.3.3.01.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	4.3.6.	Bunga Bank	1.400.000,00	1.597.364,00	197.364,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	1.400.000,00	1.597.364,00	(197.364,00)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.239.898.800,00	1.229.096.164,00	10.802.636,00
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</u>	<u>407.640.667,00</u>	<u>403.178.272,00</u>	<u>4.462.395,00</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>357.909.667,00</u>	<u>353.447.272,00</u>	<u>4.462.395,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	209.250.000,00	209.250.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	209.250.000,00	209.250.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	209.250.000,00	209.250.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	209.250.000,00	209.250.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.732.700,00	23.922.700,00	810.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	24.732.700,00	23.922.700,00	810.000,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Des	24.732.700,00	23.922.700,00	810.000,00
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	8.856.000,00	8.046.000,00	810.000,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	12.804.700,00	12.804.700,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	54.992.467,00	51.340.072,00	3.652.395,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.992.467,00	51.340.072,00	3.652.395,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.543.467,00	21.947.600,00	1.595.867,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.924.217,00	7.024.100,00	900.117,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	880.000,00	880.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Be	552.000,00	552.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabun	720.000,00	720.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	441.250,00	413.500,00	27.750,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.086.000,00	418.000,00	668.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.200.000,00	16.900.000,00	300.000,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	17.200.000,00	16.900.000,00	300.000,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.049.000,00	6.292.472,00	756.528,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	264.000,00	264.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.960.000,00	2.794.000,00	1.166.000,00
1.1.4	5.2.5.90.	Belanja Jasa Service Peralatan Elektronik	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.93.	Belanja Jasa Pajak Bunga Bank	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.5.94.	Belanja Jasa Administrasi Bank	0,00	409.472,00	(409.472,00)
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.084.600,00	3.084.600,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.084.600,00	3.084.600,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.964.600,00	2.964.600,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	245.100,00	245.100,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	199.500,00	199.500,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	120.000,00	120.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	120.000,00	120.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.389.900,00	11.389.900,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.389.900,00	11.389.900,00	0,00
1.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.389.900,00	11.389.900,00	0,00
1.1.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.815.150,00	1.815.150,00	0,00
1.1.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	574.750,00	574.750,00	0,00
1.1.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.1.92	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.1.92	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	3.197.000,00	3.197.000,00	0,00
1.3.3		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
1.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.3.3	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
1.3.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
1.3.3	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris F	0,00	0,00	0,00
1.3.90		Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	3.197.000,00	3.197.000,00	0,00
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.197.000,00	3.197.000,00	0,00
1.3.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	655.000,00	655.000,00	0,00
1.3.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	265.000,00	265.000,00	0,00
1.3.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
1.3.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	240.000,00	240.000,00	0,00
1.3.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00
1.3.90	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	640.000,00	640.000,00	0,00
1.3.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00
1.3.90	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	460.000,00	460.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.90	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	460.000,00	460.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	46.534.000,00	46.534.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.177.000,00	4.177.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.177.000,00	4.177.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.177.000,00	4.177.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	65.000,00	65.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	512.000,00	512.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.387.000,00	11.387.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.387.000,00	11.387.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.887.000,00	5.887.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	962.000,00	962.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	425.000,00	425.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	160.000,00	160.000,00	0,00
1.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	160.000,00	160.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	421.000,00	421.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.4.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	240.000,00	240.000,00	0,00
1.4.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	240.000,00	240.000,00	0,00
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00
1.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00
1.4.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	539.000,00	539.000,00	0,00
1.4.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	351.000,00	351.000,00	0,00
1.4.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
1.4.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.90	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
1.4.90	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.4.90	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>539.372.000,00</u>	<u>537.104.000,00</u>	<u>2.268.000,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>32.229.000,00</u>	<u>32.229.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	20.810.000,00	20.810.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.810.000,00	20.810.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
2.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
2.1.5		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	11.419.000,00	11.419.000,00	0,00
2.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.419.000,00	11.419.000,00	0,00
2.1.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	844.000,00	844.000,00	0,00
2.1.5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	218.000,00	218.000,00	0,00
2.1.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	176.000,00	176.000,00	0,00
2.1.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	450.000,00	450.000,00	0,00
2.1.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	960.000,00	960.000,00	0,00
2.1.5	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	960.000,00	960.000,00	0,00
2.1.5	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.5	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.5	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	9.455.000,00	9.455.000,00	0,00
2.1.5	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	9.455.000,00	9.455.000,00	0,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>29.065.000,00</u>	<u>29.065.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	60.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
2.2.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.529.000,00	7.529.000,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.529.000,00	7.529.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perfengkapan	1.259.000,00	1.259.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	199.000,00	199.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	960.000,00	960.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	740.000,00	740.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi	600.000,00	600.000,00	0,00
2.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00
2.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan	6.779.000,00	6.779.000,00	0,00
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.979.000,00	4.979.000,00	0,00
2.2.92	5.2.1.	Belanja Barang Perfengkapan	2.039.000,00	2.039.000,00	0,00
2.2.92	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	189.000,00	189.000,00	0,00
2.2.92	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
2.2.92	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.92	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
2.2.92	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
2.2.92	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.92	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.92	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll)	4.957.000,00	4.957.000,00	0,00
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.957.000,00	4.957.000,00	0,00
2.2.97	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.107.000,00	2.107.000,00	0,00
2.2.97	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	292.000,00	292.000,00	0,00
2.2.97	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00
2.2.97	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
2.2.97	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00
2.2.97	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
2.2.97	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	900.000,00	900.000,00	0,00
2.2.97	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi	510.000,00	510.000,00	0,00
2.2.97	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	160.000,00	160.000,00	0,00
2.2.97	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	160.000,00	160.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	395.100.000,00	395.100.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	395.100.000,00	395.100.000,00	0,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	395.100.000,00	395.100.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	395.100.000,00	395.100.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	30.455.000,00	30.455.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	363.642.000,00	363.642.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	225.000,00	225.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	778.000,00	778.000,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.563.000,00	78.295.000,00	2.268.000,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	21.220.000,00	21.220.000,00	0,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.220.000,00	21.220.000,00	0,00
2.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	480.000,00	480.000,00	0,00
2.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	95.000,00	95.000,00	0,00
2.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	25.000,00	25.000,00	0,00
2.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	360.000,00	360.000,00	0,00
2.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	740.000,00	740.000,00	0,00
2.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	740.000,00	740.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	59.343.000,00	57.075.000,00	2.268.000,00
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	59.343.000,00	57.075.000,00	2.268.000,00
2.4.11	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.11	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.11	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
2.4.11	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
2.4.11	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	7.690.000,00	7.690.000,00	0,00
2.4.11	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan	0,00	0,00	0,00
2.4.11	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	47.543.000,00	45.275.000,00	2.268.000,00
2.4.11	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Ma	37.290.000,00	35.022.000,00	2.268.000,00
2.4.11	5.3.8.04.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.11	5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Ke	253.000,00	253.000,00	0,00
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	0,00	0,00	0,00
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.4.14	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
2.4.14	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
2.4.14	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
2.4.14	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.14	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
2.4.14	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
2.4.14	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	0,00	0,00	0,00
2.4.14	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepa	0,00	0,00	0,00
2.5		<u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u>	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00
2.5.3		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00
2.5.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00
2.5.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	765.000,00	765.000,00	0,00
2.5.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	215.000,00	215.000,00	0,00
2.5.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
2.5.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	400.000,00	400.000,00	0,00
2.5.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
2.5.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	450.000,00	450.000,00	0,00
2.5.3	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	58.304.000,00	45.904.000,00	12.400.000,00
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	4.227.000,00	4.227.000,00	0,00
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.227.000,00	4.227.000,00	0,00
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.227.000,00	4.227.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.787.000,00	2.787.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	87.000,00	87.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	600.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	540.000,00	540.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	300.000,00	300.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi	600.000,00	600.000,00	0,00
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	28.690.000,00	16.290.000,00	12.400.000,00
3.2.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0,00	0,00	0,00
3.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
3.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
3.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
3.2.1	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
3.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
3.2.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.1	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi	0,00	0,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	28.690.000,00	16.290.000,00	12.400.000,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.690.000,00	16.290.000,00	12.400.000,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	79.000,00	79.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	721.000,00	721.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	740.000,00	740.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	740.000,00	740.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	16.400.000,00	4.000.000,00	12.400.000,00
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	16.400.000,00	4.000.000,00	12.400.000,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Otaraga Tingkat Desa	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	215.000,00	215.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	215.000,00	215.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
3.3.3	5.3.	Belanja Modal	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
3.3.3	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
3.3.3	5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hono	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahai	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	0,00	0,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.857.000,00	17.857.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	87.000,00	87.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	163.000,00	163.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	750.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	740.000,00	740.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	300.000,00	300.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi	750.000,00	750.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	10.067.000,00	10.067.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.067.000,00	10.067.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.107.000,00	2.107.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	257.000,00	257.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	640.000,00	640.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	640.000,00	640.000,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
3.4.4	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbi	0,00	0,00	0,00
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	250.000,00	250.000,00	0,00
3.4.92	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	157.000,00	157.000,00	0,00
3.4.92	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	93.000,00	93.000,00	0,00
3.4.92	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
3.4.92	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	0,00	0,00	0,00
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	0,00	0,00	0,00
4.3.2		<u>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</u>	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
4.4		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</u>	0,00	0,00	0,00
4.4.1		<u>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</u>	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.4.2		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	264.703.300,00	264.703.300,00	0,00
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	28.003.300,00	28.003.300,00	0,00
5.2.1		Penanganan Keadaan Darurat	28.003.300,00	28.003.300,00	0,00
5.2.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.003.300,00	28.003.300,00	0,00
5.2.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	28.003.300,00	28.003.300,00	0,00
5.2.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	28.003.300,00	28.003.300,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	236.700.000,00	236.700.000,00	0,00
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	236.700.000,00	236.700.000,00	0,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	236.700.000,00	236.700.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	236.700.000,00	236.700.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	236.700.000,00	236.700.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.270.019.967,00	1.250.889.572,00	19.130.395,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(30.121.167,00)	(21.793.408,00)	(8.327.759,00)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.121.167,00	30.121.167,00	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.121.167,00	30.121.167,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.121.167,00	30.121.167,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			30.121.167,00	30.121.167,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	8.327.759,00	(8.327.759,00)



**BADAN PERMUSYAWARATA DESA
DESA JATILUHUR KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILUHUR KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa harus dipertanggungjawabkan melalui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UndangpUndang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2) dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67);
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
34. Peraturan Desa Jatiluhur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 ;
35. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabekelan;
36. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun Anggaran 2020;
37. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatiluhur Nomor 2 Tahun 2019 Tanggal 05 Juli 2019 Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Jatiluhur Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 26 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : BPD Desa Jatiluhur
Pada Tanggal : 26 Januari 2021



BAMBANG SUHARTONO
 KETUA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini *selasa* , tanggal *dua puluh enam*, bulan *januari* Tahun *Dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Desa Jatiluhur, Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah Khusus BPD sebagai berikut :

A. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

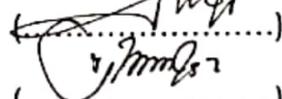
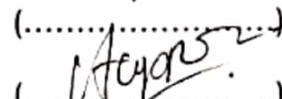
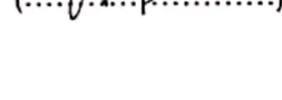
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	407.640.667,-	403.178.272,-	4.462.395,-
	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000,-	30.000.000,-	0,-
	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	209.250.000,-	209.250.000,-	0,-
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.732.700,-	23.922.700,-	810.000,-
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	54.992.467,-	51.340.072,-	3.652.395,-
	Penyediaan Tunjangan BPD	14.460.000,-	14.460.000,-	0,-
	Penyediaan Operasional BPD	3.084.600,-	3.084.600,-	0,-
	Penyediaan Operasional RT RW	11.389.900,-	11.389.900,-	0,-
	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	1.500.000,-	1.500.000,-	0,-
	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	8.500.000,-	8.500.000,-	0,-
	Pengelolaan kearsipan	0,-	0,-	0,-
	Fasilitasi Pendataan Penduduk Miskin	3.197.000,-	3.197.000,-	0,-
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	4.177.000,-	4.177.000,-	0,-
	Penyusunan dan Penetapan RKPDes	11.387.000,-	11.387.000,-	0,-
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes,LPJ	17.280.000,-	17.280.000,-	0,-
	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa	13.690.000,-	13.690.000,-	0,-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	539.372.000	537.104.000	2.268.000
	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ	20.810.000,-	20.810.000,-	0,-
	Pelatihan pendidik PAUD	0,-	0,-	0,-

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5
	Kegiatan Rehab Gedung PAUD (teras dan kamar mandi)	11.419.000,-	11.419.000,-	0,-
	Kegiatan PMT (Pencegahan Stunting)	9.800.000,-	9.800.000,-	0,-
	Kegiatan Penyuluhan Kader Kesehatan	7.529.000,-	7.529.000,-	0,-
	Kegiatan Promosi Kesehatan (RDS)	6.779.000,-	6.779.000,-	0,-
	Kegiatan Fasilitasi peduli AIDS	4.957.000,-	4.957.000,-	0,-
	Kegiatan Pembangunan Peningkatan jalan Poros Besuki-Margolunyu Kidul	395.100.000,-	395.100.000,-	0,-
	Kegiatan Pemugaran RTLH	21.220.000,-	21.220.000,-	0,-
	Kegiatan Peningkatan Jaringan air bersih	59.343.000,-	57.075.000,-	2.268.000,-
	Kegiatan Pembangunan MCK Bagi RTM	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan sosialisasi Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup	2.415.000,-,-	2.415.000,-	0,-
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	58.304.000,-	45.904.000,-	12.400.000,-
1	Kegiatan Penguatan, peningkatan Kapasitas Linmas	4.227.000,-	4.227.000,-	0,-
	Kegiatan Pembinaan Grup Kesenian di desa	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan penyelenggaraan HUT RI dan Merdi Desa Suran	28.690.000,-	16.290.000,-	12.400.000,-
	Kegiatan Penyelenggaraan Olahraga	7.530.000,-	7.530.000,-	0,-
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Lapangan	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan pembinaan LKMD	2.790.000,-	2.790.000,-	0,-
	Kegiatan pembinaan PKK	10.067.000,-	10.067.000,-	0,-
	Kegiatan Pelatihan KPMD	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan Fasilitasi KPMD	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan pemerintah Desa	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan penguatan kapasitas Kelompok Perempuan (Pelatihan Ketrampilan bahan dasar bambu)	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan penyuluhan Perlindungan Anak	0,-	0,-	0,-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	264.703.300,-	264.703.300,-	0,-
	Belanja tidak terduga	28.003.300,-	28.003.300,-	0,-
	Pangan Keadaan Mendesak Desa	236.700.000,-	236.700.000,-	0,-

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5
	JUMLAH BELANJA	1.270.019.967,-	1.250.889.572,-	19.130.395,-
	SURPLUS/ (DEVISIT)	(30.0121.167,-)	(21.793.408,-)	(8.327.759,-)
6	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.121.167,-	30.121.167,-	0,-
	Silpa Tahun Sebelum	30.121.167,-	30.121.167,-	0,-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,-	0,-	0,-
	Penyertaan Modal Desa	0,-	0,-	0,-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	30.121.167,-	30.121.167,-	0,-
	SILPA TAHUN BERJALAN	0,-	8.327.759,-	(8.327.759,-)

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JATILUHUR**

Ketua	:	BAMBANG SUHARTONO	(..... )
Wakil Ketua	:	MIRIN SISWOMIHARJO	(..... 
Sekretaris	:	NOVITA SARI	(..... 
Anggota	:	SUWARSONO	(..... 
Anggota	:	AGUNG KUSMARDONO	(..... 
Anggota	:	SUWARTO	(..... 
Anggota	:	SUPRIYANTO	(..... 

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini senin tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di desa Jatiluhur, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	407.640.667,-	403.178.272,-	4.462.395,-
	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000,-	30.000.000,-	0,-
	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	209.250.000,-	209.250.000,-	0,-
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.732.700,-	23.922.700,-	810.000,-
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	54.992.467,-	51.340.072,-	3.652.395,-
	Penyediaan Tunjangan BPD	14.460.000,-	14.460.000,-	0,-
	Penyediaan Operasional BPD	3.084.600,-	3.084.600,-	0,-
	Penyediaan Operasional RT RW	11.389.900,-	11.389.900,-	0,-
	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	1.500.000,-	1.500.000,-	0,-
	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	8.500.000,-	8.500.000,-	0,-
	Pengelolaan kearsipan	0,-	0,-	0,-
	Fasilitasi Pendataan Penduduk Miskin	3.197.000,-	3.197.000,-	0,-
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	4.177.000,-	4.177.000,-	0,-
	Penyusunan dan Penetapan RKPDes	11.387.000,-	11.387.000,-	0,-
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes,LPJ	17.280.000,-	17.280.000,-	0,-
	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa	13.690.000,-	13.690.000,-	0,-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	539.372.000	537.104.000	2.268.000
	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ	20.810.000,-	20.810.000,-	0,-
	Pelatihan pendidik PAUD	0,-	0,-	

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5
	Kegiatan Rehab Gedung PAUD (teras dan kamar mandi)	11.419.000,-	11.419.000,-	0,-
	Kegiatan PMT (Pencegahan Stunting)	9.800.000,-	9.800.000,-	0,-
	Kegiatan Penyuluhan Kader Kesehatan	7.529.000,-	7.529.000,-	0,-
	Kegiatan Promosi Kesehatan (RDS)	6.779.000,-	6.779.000,-	0,-
	Kegiatan Fasilitasi peduli AIDS	4.957.000,-	4.957.000,-	0,-
	Kegiatan Pembangunan Peningkatan jalan Poros Besuki-Margolunyu Kidul	395.100.000,-	395.100.000,-	0,-
	Kegiatan Pemugaran RTLH	21.220.000,-	21.220.000,-	0,-
	Kegiatan Peningkatan Jaringan air bersih	59.343.000,-	57.075.000,-	2.268.000,-
	Kegiatan Pembangunan MCK Bagi RTM	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan sosialisasi Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup	2.415.000,-	2.415.000,-	0,-
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	58.304.000,-	45.904.000,-	12.400.000,-
1	Kegiatan Penguatan, peningkatan Kapasitas Linmas	4.227.000,-	4.227.000,-	0,-
	Kegiatan Pembinaan Grup Kesenian di desa	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan penyelenggaraan HUT RI dan Merdi Desa Suran	28.690.000,-	16.290.000,-	12.400.000,-
	Kegiatan Penyelenggaraan Olahraga	7.530.000,-	7.530.000,-	0,-
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Lapangan	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan pembinaan LKMD	2.790.000,-	2.790.000,-	0,-
	Kegiatan pembinaan PKK	10.067.000,-	10.067.000,-	0,-
	Kegiatan Pelatihan KPMD	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan Fasilitasi KPMD	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan pemerintah Desa	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan penguatan kapasitas Kelompok Perempuan (Pelatihan Ketrampilan bahan dasar bambu)	0,-	0,-	0,-
	Kegiatan penyuluhan Perlindungan Anak	0,-	0,-	0,-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	264.703.300,-	264.703.300,-	0,-
	Belanja tidak terduga	28.003.300,-	28.003.300,-	0,-
	Panganan Keadaan Mendesak Desa	236.700.000,-	236.700.000,-	0,-

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5
	JUMLAH BELANJA	1.270.019.967,-	1.250.889.572,-	19.130.395,-
	SURPLUS/ (DEVISIT)	(30.0121.167,-)	(21.793.408,-)	(8.327.759,-)
6	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.121.167,-	30.121.167,-	0,-
	Silpa Tahun Sebelum	30.121.167,-	30.121.167,-	0,-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,-	0,-	0,-
	Penyertaan Modal Desa	0,-	0,-	0,-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	30.121.167,-	30.121.167,-	0,-
	SILPA TAHUN BERJALAN	0,-	8.327.759,-	(8.327.759,-)

B. Menyepakati laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 setelah menyelesaikan koreksi atas laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatiluhur, 25 Januari 2020



Kepala Desa Jatiluhur

(SUPRIYONO)



Ketua BPD Desa Jatiluhur

(BAMBANG SUHARTONO)

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket.
1.	Bambang S			Ketua BPD
2.	Melin S	Rt 01/03		Wakil Ketua BPD
3.	Novita Sari	Rt.02/03		Sekretaris BPD
4.	Agung	Rt.04/01		Anggota BPD
5.	Suwarno	Rt 04/02		Anggota BPD
6.	Suryanto	Rt 03/01		Anggota BPD
7.				Anggota BPD
8.	Supriyono	Rt 03/1		Kepala Desa
9.	Nah-pud	4/2		Sekretaris Desa
10.	Iwan Sungsoro	Rt 01/03		Unsur Masyarakat
11.				Unsur Keagamaan
12.	Heli Sehyani	Rt 4/2		Unsur Anak

DAFTAR HADIR

Hari : Senin, 25 Januari 2021
 Tanggal : 25 Januari 2021
 Acara : Pembahasan Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APBDes
 Tempat : TA 2020
 Balai Desa Jatiluhur.

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	SUPRIYONO	Kader	RT03/1	1
2	Bambang S	BPD	RT07/02	2
3	Darang H	RT.	RT06/02	3
4	Bambas S.	RT.	RT01/02	4
5	Kodasi	RT	03/02	5
6	MUJLOND	RT.	02/01	6
7	SAIDIN	RT	RT03/03	7
8	Umar To	RT.	01/2	8
9	Supri Jadi	RT	03/01	9
10	SURYADI	RT	04/01	10
11	Jonhendri	RT	04/02	11
12	Iwan Singlowo	RT	01/03	12
13	Edi Romplan	RT	05/02	13
14	Muti Khudin	RT	02/02	14
15	Alkautik Must. M		004/001	15
16	Khatir Khatuloh		04/02	16
17	Seratman		04/02	17
18	Salmih	Radikal	RT01/01	18
19	Basjaya	RT	RT/3/3	19
20	Rino Octavianingsih	PD	RT 01/03	20
21	Heti Setyani	KPM	RT 04/02	21
22	Murnah	RW	RT 03/03	22
23	Wirdafan	Pick	"	23
24	Wint Setyani	PKK	RT 03/01	24
25	Sri Kurniasih	Perangkat	RT02/02	25
26	Nurha Sari	BPD	2/3	26
27	Eki Listiani	Perangkat		27
28	Minir KM	MPP	1/3	28
29	Wahyudi	Solides	RT 04/02	29
30	Suwarsono	BPD	"	30
31	Supriyanto	"	RT 03/01	31
32	Aqung	"	4/1	32
33				33
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40



Mengetahui
Kepala Desa Jatiluhur

SUPRIYONO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 157/DS- Jatiluhur /I /2021

Nomor : 2/BPD-Jatiluhur /I/2021

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JATILUHUR**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 SUPRIYONO : Kepala Desa Jatiluhur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatiluhur selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- 2 BAMBANG SUHARTONO : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Jatiluhur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jatiluhur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi, atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Rowokele untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA
TAHUN 2020

Berkaitan dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa di Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Kabupaten/kota Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 29 Januari 2021
Jam : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Jatiluhur

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020. Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Kriteria Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020, meliputi :

1. Kode Program, Kegiatan dan Kode Belanja Sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes).
2. Penyesuaian Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Bambang Suhartono dari Ketua BPD
Notulen : Novita Sari dari Sekretaris BPD
Narasumber : 1. Supriyono dari Kepala Desa
2. Wakhyudi dari Sekrtaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020 :

Peserta Musyawarah Menyepakati Semua Kegiatan dan Program Pelaksanaan APB Desa Tahun 2020.

1. Peserta Musyawarah Menyepakati Hasil Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

2. Peserta Musyawarah Menyepakati Hasil Pembahasan Draf Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk di sahkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan Rincian Sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan	Rp.	1.239.898.800,00	1.229.096.164,00
2. Belanja	Rp.	<u>1.270.019.967,00</u>	<u>1.250.889.572,00</u>
Surplus/Devisit	Rp.	(30.121.167,00)	(21.793.409,00)
3. Pembiayaan			
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	30.121.167,00	30.121.167,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	30.121.167,00	30.121.167,00
Silpa		0,00	8.327.759,00

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh Tanggungjawab.

Jatiluhur, 29 Januari 2020

Kepala Desa Jatiluhur

 (SUPRIYONO)

Ketua BPD Desa Jatiluhur

 (BAMBANG SUHARTONO)

Wakil Kelompok Masyarakat


 (.....Iwan Sungkoro.....)

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
 Tanggal : 29 Januari 2021
 Acara : Musdes Laj APBDes TA.2020
 Tempat : Aula Balai Desa Jatiluhur

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	Bayu Aji Wasejo	TNI	Koramil/RWk	
2	1 Kurniawan S	Sekecam	12 onduy	2
3	Bambang S	BPD	RT 05/02	3
4	SUWARTO	SPD	RT 01/07	4
5	SUPRIYAMA	KAPER	RT 03/1	5
6	ZUTRIY	Palmeri	polseke ruk	6
7	Khaqin Nashrudin	Ponder.	021/02	7
8	Leni T	PLD	Kec. Rowokele	8
9	Suherus	Kari jaym	Uc Kanna	9
10	Heni Furi Kochman	RW	Rt. 2. RW 1	10
11	MUJIBOND	RT	RT 4 RW 1	11
12	Denang A	RT.	Jatiluhur	12
13	Margiyati	PKK	Jatiluhur 3/1	13
14	Khadidatun	PKK	4/2	14
15	Endah pwi S	PKK	Jatiluhur 01/02	15
16	Jonhendri	RT	Jatiluhur 04/02	16
17	Edi Romelan	RT	Jatiluhur 5/02	17
18	Munawar	RT.	01/1	18
19	Ety Nurani	Kader	Jatiluhur 2/1	19
20	Agus	BPD	K 04/07	20
21	Kodari	RT	03/02.	21
22	Bambang S	RT.	01/02	22
23	1 SAIDIN	RT	03/03	23
24	Bunarti	Kader	03/01	24
25	SURYADIR	RT	04/01	25
26	Nanda	PKK	03/03	26
27	Nurtek W	Bides	1/3	27
28	Mingsun	RT	2/3	28
29	Mujinah	RW	3/3	29
30	B. Yogi	PKK	1/1	30
31	Muhammad S.	leprun.	1/3	31
32	Muslihudin	RT	2/2	32
33	Novita Sari	BPD	2/3	33
34	SCALASTRI	PKIC	3/1	34
35	Siti Nur	Uc		35
36	Wibit Setiyani	PKK	3/1	36
37	Moh Hasan Supul Kijal	PD		37
38	Sri Harahut	Kari jaym	Krcant	38
39	TURAWO	RW 02	02/02	39
40	Kodir	Uc		40

41	Eki listiani	Perangkat	Rt 6/2	41
42	Wahyud	Sekdes	4/2	42
43	Hoki Setyanii	Picik	4/2	43
44	Rno Octavlaningsih	Perangkat Desa	1/3	44
45	Sukarti	Kader	"	45
46	Baroyo	Perangkat		46
47	Salmin		Ki 1/1	47
48	Suatman	"		48
49	Sri Kurniasih	"	Rt 02/02	49
50	Atarika M	"	2/04/02	50
51	Suarsono	BPD		51
52	Mina Sari	"		52
53	Supriyanto	"		53
54	Nasiman	LPMD	2/1	54
55	Singgih P	Karang Tamna		55
56	Siswanto	"	2/1	56
57	Supriyadi	Ri	3/1	57
58	Sahri	Tomas	4/2	58
59	Tri Waluyo	Linmas	2/1	59
60	Pido	Bumdes		60
61	Nunudrn		4/1	61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70

Mengetahui

Kepala Desa Jatiluhur



SUPRIYONO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JATILUHUR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB
DESA 2020

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Jatiluhur
Kecamatan Rowokele
Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2020
Daftar Isi

	<i>halaman</i>
I Laporan Realisasi APBDes	1
II Catatan Atas Laporan Keuangan	2
A. Informasi Umum	2
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	2
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	8
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	8
2 Pendapatan Asli Desa	8
3 Dana Desa	9
4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	9
5 Alokasi Dana Desa	9
6 Bantuan Keuangan Propinsi	10
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	10
8 Pendapatan Lain lain	
9 Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
12 BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	
15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	
16 Pembiayaan	
17 Aset Desa	
18 Penyertaan Modal Desa	
Lampiran	
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa	
Lampiran 2 - Laporan Realisasi Kegiatan	
Lampiran 3 - Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk Ke Desa	

LAPORAN REALISASI APB DESA				
PEMERINTAH DESA JATILUHUR				
Kecamatan Rowokele				
Kabupaten Kebumen				
TAHUN ANGGARAN 2020				
	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	5.000.000	-	5.000.000
Pendapatan Transfer				-
Dana Desa	C.3	863.320.000	863.320.000	-
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	30.164.500	30.164.500	-
Alokasi Dana Desa	C.5	313.958.300	313.958.300	-
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	5.000.000	5.000.000	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	15.056.000	15.056.000	-
Pendapatan Lain lain	C.8	7.400.000	1.597.364	5.802.636
Jumlah PENDAPATAN		<u>1.239.898.800</u>	<u>1.229.096.164</u>	<u>10.802.636</u>
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	407.640.667	403.178.272	4.462.395
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	539.372.000	537.104.000	2.268.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	58.304.000	45.904.000	12.400.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	-	-	-
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	264.703.300	264.703.300	-
Jumlah BELANJA	C.14	<u>1.270.019.967</u>	<u>1.250.889.572</u>	<u>19.130.395</u>
SURPLUS/(DEFISIT)		<u>(30.121.167)</u>	<u>(21.793.408)</u>	<u>(8.327.759)</u>
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	30.121.167	30.121.167	-
Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		<u>30.121.167</u>	<u>30.121.167</u>	<u>-</u>
SILPA TAHUN BERJALAN		-	8.327.759	(8.327.759)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Jatiluhur, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2020

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Jatiluhur merupakan desa di Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen. Sesuai dengan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2017 Tanggal 31 Oktober 2017, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Jatiluhur terdiri dari:

1. Kepala Desa : Supriyono
2. Sekretaris Desa : Wakhyudi
3. Kepala Urusan Keuangan : Rina Oktavianingsih

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jl Jatiluhur-Wonoharjo Km. 01, Desa Jatiluhur, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APB Desa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2019		<u>30.121.167</u>
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	-	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	-	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	<u>0</u>	
Saldo Kas per 31 Desember 2019		<u>30.121.167</u>

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:	5.000.000	-	5.000.000
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	5.000.000	-	5.000.000
b. Hasil Aset	-	-	-
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	-
d. Lain-lain PADes yang sah	-	-	-
	<u>5.000.000</u>	<u>-</u>	<u>5.000.000</u>

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Tahap 1	349.650.800	349.650.800	-
Tahap 2	345.328.000	345.328.000	-
Tahap 3	168.341.200	168.341.200	-
	<u>863.320.000</u>	<u>863.320.000</u>	<u>-</u>

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	30.164.500	30.164.500	-
	<u>30.164.500</u>	<u>30.164.500</u>	<u>-</u>

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:	313.958.300	313.958.300	-
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Tahap 1	78.489.000	78.489.000	-
Tahap 2	78.489.000	78.489.000	-
Tahap 3	78.489.000	78.489.000	-
Tahap 4	78.491.300	78.491.300	-
	<u>313.958.300</u>	<u>313.958.300</u>	<u>-</u>
6. Bantuan Keuangan Propinsi			
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Bantuan Keuangan untuk KPMD	5.000.000	-	5.000.000
Bantuan Keuangan Sarana Dan Prasarana Desa	-	-	-
Bantuan Keuangan Ketahanan Masyarakat	-	-	-
Bantuan Keuangan RTLH	-	-	-
	<u>5.000.000</u>	<u>-</u>	<u>5.000.000</u>
7. Bantuan Keuangan Kabupaten			
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:	15.056.000	15.056.000	-
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Bantuan Keuangan Untuk BPJS Kesehatan	10.056.000	10.056.000	-
Bantuan Keuangan untuk TPQ	5.000.000	5.000.000	-
Bantuan Keuangan untuk Kawasan	-	-	-
Bantuan Keuangan untuk Sanitasi Lingkungan	-	-	-
	<u>15.056.000</u>	<u>15.056.000</u>	<u>-</u>
8. Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan lain-lain terdiri dari:	7.400.000	1.597.364	5.802.636
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	-	-	-
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	-	-	-
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	6.000.000	-	6.000.000
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	-	-	-
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	-	-	-
Bunga bank	1.400.000	1.597.364	(197.364)
Lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-
	<u>7.400.000</u>	<u>1.597.364</u>	<u>5.802.636</u>
9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:	407.640.667	403.178.272	4.462.395
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Pegawai	288.442.700	287.632.700	810.000
Belanja Barang dan Jasa	119.197.967	115.545.572	3.652.395
Belanja Modal	-	-	-
	<u>407.640.667</u>	<u>403.178.272</u>	<u>4.462.395</u>
10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:	539.372.000	537.104.000	2.268.000
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Barang dan Jasa	83.129.000	83.129.000	-
Belanja Modal	456.243.000	453.975.000	2.268.000
	<u>539.372.000</u>	<u>537.104.000</u>	<u>2.268.000</u>
11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:	58.304.000	45.904.000	12.400.000

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Barang dan Jasa	53.904.000	41.504.000	12.400.000
Belanja Modal	4.400.000	4.400.000	-
	<u>58.304.000</u>	<u>45.904.000</u>	<u>12.400.000</u>
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:			
	-	-	-
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Selama tahun anggaran 2019, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Tidak Terduga	264.703.300	264.703.300	-
	<u>264.703.300</u>	<u>264.703.300</u>	<u>-</u>
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi			
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000	30.000.000	-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	209.250.000	209.250.000	-
Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.200.000	1.200.000	-
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	8.856.000	8.046.000	-
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.872.000	1.872.000	-
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	12.804.700	12.804.700	-
Tunjangan BPD	14.460.000	14.460.000	-
Tambahkan Tunjangan Kepala Desa	1.500.000	1.500.000	-
Tambahkan Tunjangan Perangkat Desa	8.500.000	8.500.000	-
	<u>288.442.700</u>	<u>287.632.700</u>	<u>-</u>
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	104.754.967	103.159.100	1.595.867
Belanja Jasa Honorarium	73.312.000	73.012.000	300.000
Belanja Operasional Aparatur Desa	13.830.000	13.830.000	-
Belanja Jasa Sewa	19.900.000	7.500.000	12.400.000
Belanja Operasional Perkantoran	7.049.000	6.292.472	756.528
Belanja Pemeliharaan	12.455.000	11.455.000	1.000.000
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	24.930.000	24.930.000	-
	<u>256.230.967</u>	<u>240.178.572</u>	<u>16.052.395</u>
Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	3.000.000	3.000.000	-
Belanja Modal Jalan	395.100.000	395.100.000	-
Belanja Modal Gedung/Bangunan	8.800.000	8.800.000	-
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	47.543.000	45.275.000	2.268.000
Belanja Modal lainnya	6.200.000	6.200.000	-
	<u>460.643.000</u>	<u>458.375.000</u>	<u>2.268.000</u>
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	357.909.667	353.447.272	4.462.395
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.197.000	3.197.000	-
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.534.000	46.534.000	-

	407.640.667	403.178.272	4.462.395
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	32.229.000	32.229.000	-
Sub Bidang Kesehatan	29.065.000	29.065.000	-
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	395.100.000	395.100.000	-
Sub Bidang Kawasan Permukiman	80.563.000	78.295.000	2.268.000
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.415.000	2.415.000	-
	<u>539.372.000</u>	<u>537.104.000</u>	<u>2.268.000</u>
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4.227.000	4.227.000	-
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.690.000	16.290.000	12.400.000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	7.530.000	7.530.000	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.857.000	17.857.000	-
	<u>58.304.000</u>	<u>45.904.000</u>	<u>12.400.000</u>
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	-	-
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Keadaan Darurat	28.003.300	28.003.300	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak	236.700.000	236.700.000	-
	<u>264.703.300</u>	<u>264.703.300</u>	<u>-</u>
16. Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Penerimaan Pembiayaan	30.121.167	30.121.167	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	<u>30.121.167</u>	<u>30.121.167</u>	<u>-</u>
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	30.121.167	30.121.167	-
	<u>30.121.167</u>	<u>30.121.167</u>	<u>-</u>
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17. Aset Desa			
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,			
	<u>20x0</u>	<u>20x1</u>	<u>Penambahan/ (Pengurangan)</u>
Tanah	0	0	-
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	0	0	-
Kendaraan	0	0	-
Gedung dan Bangunan	0	0	-
Jalan	0	0	-
Jembatan	0	0	-
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	0	0	-
Jaringan/Instalasi	0	0	-
Aset Tetap lainnya	0	0	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran			
18. Penyertaan Modal Desa			
Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,			

	2019	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
BUM Desa Jatiluhur	20.000.000	-	20.000.000
	20.000.000	-	20.000.000
19. Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa			
Bengkok Kepala Desa	:	4,288	Hektoare
Blok 005		2049,3	ubin
Blok 005		505,0	ubin
Blok 009		508,9	ubin
Bengkok Sekretaris Desa	:	1,061	Hektoare
Blok 009		381,2	ubin
Blok 002		376,9	ubin
Bengkok Kaur Perencanaan	:	0,256	Hektoare
Blok 009		89,1	ubin
Blok 009		93,8	ubin
Bengkok Kaur Keuangan	:	0,349	Hektoare
Blok 002		124,1	ubin
Blok 002		125,4	ubin
Bengkok Kaur Tata Usaha dan Umum	:	0,647	Hektoare
Blok 002		229,1	ubin
Blok 002		232,8	ubin
Bengkok Kasi Pemerintahan	:	0,347	Hektoare
Blok 002		127,2	ubin
Blok 002		120,6	ubin
Bengkok Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	:	0,332	Hektoare
Blok 002		147,0	ubin
Blok 002		90,2	ubin
Bengkok Kepala Dusun Margolunyu Kidul	:	0,283	Hektoare
Blok 002		114,1	ubin
Blok 009		87,6	ubin
Bengkok Kepala Dusun Besuki	:	0,399	Hektoare
Blok 002		139,1	ubin
Blok 002		146,1	ubin
Bengkok Kepala Dusun Margolunyu Lor	:	0,315	Hektoare
Blok 002		106,0	ubin
Blok 002		119,0	ubin
Bengkok Pensiunan	:	0,981	Hektoare
Blok 002		462,9	ubin
Blok 009		237,5	ubin
bengkok ili ili	:	0,149	Hektoare
Blok 009		106,3	ubin
bengkok Kemakmuran	:	0,069	Hektoare
Blok 009		49,1	ubin
Lapangan & SD	:	0,917	Hektoare
Blok 002		533,6	ubin
Blok 006		121,6	ubin
Total		7.423,6	ubin
		10,393	Hektoare

Pemerintah Desa Jatiluhur
Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen
Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 2020

No.	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap*)	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
I	Tanah								
	1 Tanah Bengkok					1945	16.920.678.929	Baik	
	2 Tanah Lapangan					1945	1.334.107.143	Baik	
	3 Tanah SDN Jatiluhur					1945	304.107.143	Baik	
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat								
	1 Kursi					1996	100.000	Rusak Berat	20 Buah
	2 Lemari					2001	800.000	Rusak Berat	1 Buah
	3 Kursi Sofa					2003	900.000	Baik	1 Set
	4 Almari					2007	2.700.000	Rusak Ringan	1 Buah
	5 Almari					2009	1.800.000	Rusak Ringan	1 Buah
	6 Filing Cabinet					2010	1.351.000	Rusak Ringan	1 Buah
	7 Rak Arsip					2010	519.000	Baik	1 Buah
	8 Kursi					2011	3.375.000	Rusak Ringan	75 Buah
	9 Kursi					2012	2.000.000	Rusak Ringan	50 Buah
	10 Meja Rapat/Tulis					2012	3.000.000	Rusak Berat	10 Buah
	11 Lap top Lenovo					2013	4.000.000	Rusak Berat	1 Buah
	12 Lap top Lenovo					2013	5.000.000	Rusak Ringan	1 Buah
	13 Meja Kerja/Tulis					2013	1.500.000	Baik	1 Buah
	14 Lap top Lenovo					2014	4.500.000	Rusak Ringan	1 Buah
	15 Lap top Lenovo(BPD)					2014	4.500.000	Rusak	1 Buah
	16 Lemari BPD					2014	1.500.000	Baik	1 Buah
	17 Meja BPD					2014	1.600.000	Baik	4 Buah
	18 Kursi BPD					2014	350.000	Baik	7 Buah
	19 Meja Resepsion					2015	4.000.000	Baik	1 Set
	20 Kursi Tunggu					2015	1.750.000	Baik	1 Set
	21 Genset Generator					2015	5.500.000	Baik	1 Buah
	22 Modem Hotspot					2015	850.000	Baik	1 Set
	23 Proyektor/LCD					2015	7.500.000	Baik	1 Set
	24 Filing Cabinet					2015	2.000.000	Baik	1 Buah
	25 Lemari					2015	1.250.000	Baik	1 Buah
	26 Kipas Angin					2016	800.000	Baik	2 Buah
	27 Piring					2016	72.000	Baik	2 Lusin
	28 Gelas					2016	75.000	Baik	3 Lusin
	29 sendok					2016	50.000	Baik	2 Lusin
	30 Taplak meja					2016	400.000	Baik	16 Buah
	31 Laptop					2016	10.000.000	Rusak Ringan	2 Buah
	32 Printer L220					2016	2.850.000	Rusak Ringan	1 Buah
	33 Camera digital					2016	1.800.000	Rusak Ringan	1 Buah
	34 Runningtex					2017	4.000.000	Baik	1 Set
	35 Gorden Jendela					2017	1.200.000	Baik	16 Set
	36 Meja Kerja Posyandu					2018	8.000.000	Baik	10 Buah
	37 Kursi Kerja Posyandu					2018	2.200.000	Baik	20 Buah
	38 Meja Rapat					2018	2.000.000	Baik	1 Set
	39 Filing Kabinet					2018	3.000.000	Baik	1 Set
	40 Filing Kabinet					2018	12.500.000	Baik	5 Set
	41 Lemari					2018	1.200.000	Baik	1 Buah
	42 Filing Kabinet					2018	2.500.000	Baik	1 Buah
	43 Mesin Jahit					2018	8.000.000	Baik	2 Buah
	44 Rak Arsip					2018	3.500.000	Baik	2 Buah
	45 Laptop					2018	13.700.000	Baik	2 Buah
	46 Timbangan Bayi Tidur					2019	3.750.000	Baik	5 Buah
	47 Tensi Digital					2019	4.250.000	Baik	5 Buah
	48 Timbangan Injak					2019	850.000	Baik	5 Buah
	49 Timbangan Dajin					2019	2.750.000	Baik	5 Buah
	50 Thermometer Digital					2019	300.000	Baik	5 Buah
	51 Laptop					2019	8.000.000	Baik	1 Buah
	52 Printer L3110					2019	3.000.000	Baik	1 Buah
	53 Printer LX-310					2019	3.000.000	Baik	1 Buah
	54 Lemari Rak					2019	4.500.000	Baik	1 Buah
	55 Meja Rapat					2019	4.000.000	Baik	8 Buah
	56 Papan Nama Perangkat					2019	738.000	Baik	10 Buah
	57 Komputer					2019	7.230.000	Baik	1 Unit
	58 Mouse					2019	44.000	Baik	1 Buah
	59 Kipas Angin					2019	2.700.000	Baik	6 Buah
	60 Kursi Putar					2019	5.900.000	Baik	2 Buah
	61 HP android					2020	1.800.000	Baik	1 Buah
	62 Jet Pump					2020	3.000.000	Baik	2 Buah
III	Kendaraan								
	1 Sepeda Motor(New Vega)					2013	14.000.000	Rusak Ringan	(PEMDA)
	2 Viar Roda 3					2018	30.000.000	Baik	BUMDesa
IV	Gedung dan Bangunan								
	1 Gedung Lembaga Desa					2008	15.000.000	Baik	
	2 Gedung Kantor Desa					2009	15.000.000	Rusak Ringan	Perlu Rehab
	3 Gedung Polindes					2012	68.000.000	Baik	
	4 Gedung Paud					2013	68.000.000	Rusak Ringan	
	5 Gedung Balai Desa					2015	30.000.000	Baik	Rehab
	6 Gedung Unit Usaha Bumdes ASA					2017	179.000.000	Baik	
V	Jalan								
	1 Jalan Desa Lokasi di RT 01/01, 800 m					2004	-	Rusak Ringan	
	2 Jalan Desa Lokasi di RT 02/01, 1200 m					2017	-	Baik	
	3 Jalan Desa Lokasi di RT 03/01, 400 m					2018	-	Baik	
	4 Jalan Desa Lokasi di RT 04/01, 600 m					2017	-	Baik	
	5 Jalan Desa Lokasi di RT 01/02, 200 m					2011	-	Rusak Ringan	
	6 Jalan Desa Lokasi di RT 02/02, 450 m					2017	-	Baik	
	7 Jalan Desa Lokasi di RT 03/02, 870 m					2018	-	Baik	

No.	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Klas Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap*)	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
	8 Jalan Desa Lokasi di RT 04/02, 200 m	2017	-	Baik	
	9 Jalan Desa Lokasi di RT 05/02, 150 m	2018	-	Baik	
	10 Jalan Desa Lokasi di RT 06/02, 250 m	2016	-	Rusak Ringan	
	11 Jalan Desa Lokasi di RT 01/03, 450 m	2017	-	Baik	
	12 Jalan Desa Lokasi di RT 02/03, 900 m	2004	-	Rusak Berat	
	13 Jalan Desa Lokasi di RT 03/03, 850 m	2004	-	Rusak Berat	
	14 Jalan Besuki-Margolunyu Kidul, 913 m	2020	-	Baik	
VI	Jembatan								
	1 Jembatan Rt 01 Rw 01	2007	-	rusak berat	
	2 Jembatan Rt 03 Rw 01	2016	-	Baik	
	3 Jembatan Rt 03 Rw 01	2019	35.000.000	Baik	
	4 Jembatan Rt 02 Rw 02	2010	-	Baik	
	5 Jembatan Rt 02 Rw 02	2012	-	Baik	
	6 Jembatan Rt 03 Rw 03	2017	370.000.000	Baik	
VII	Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase								
	1 Irigasi Dk Besuki	2013	30.000.000	Baik	
	2 Irigasi Dk Margolunyu Lor	2014	50.000.000	Rusak Ringan	
	3 Irigasi Dk Margolunyu Lor/Jalur Remba	2012	-	Rusak Berat	
VIII	Jaringan/Instalasi								
	1 Jaringan Internet	2019	10.500.000	Baik	8 Pal (1 Paket)
IX	Aset Tetap lainnya								
	1				
	2				
	3				
X	Konstruksi dalam Pengerjaan								
	1				
	2				
	3				
Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020							19.669.397.214		

*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

**LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER*
TAHUN ANGGARAN 2020**

DESA : JATILUHUR
KECAMATAN : ROWOKELE
KABUPATEN : KEBUMEN
PROVINSI :

REKENING	URAIAN	RENCANA			OUTPUT			REALISASI				SUMBER DANA			Bentuk Lain			
		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain-Lain (Rp)				
																3	4	5
1	2																	
a																		
b																		
c																		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
1	1	1	bulan	30.000.000	12	bulan	30.000.000	100			30.000.000							
1	1	1	bulan	209.250.000	12	bulan	209.250.000	100			209.250.000							
1	1	1	bulan	24.732.700	12	bulan	23.922.700	96,724984			14.676.700				9.246.000			
1	1	1	bulan	54.992.467	12	bulan	51.340.072	93,358372			44.105.600				9.420.867			
1	1	1	bulan	14.460.000	12	bulan	14.460.000	100			14.460.000							
1	1	1	bulan	3.084.600	12	bulan	3.084.600	100			3.084.600				3.084.600			
1	1	1	bulan	11.389.900	12	bulan	11.389.900	100			11.389.900				11.389.900			
1	1	1	bulan	1.500.000	12	bulan	1.500.000	100			1.500.000				1.500.000			
1	1	1	bulan	8.500.000	12	bulan	8.500.000	100			8.500.000				8.500.000			
1	3	90	bulan	3.197.000	12	bulan	3.197.000	100			3.197.000							
1	4	2	bulan	4.177.000	12	bulan	4.177.000	100			4.177.000							
1	4	3	bulan	11.387.000	12	bulan	11.387.000	100			11.387.000							
1	4	4	bulan	17.280.000	12	bulan	17.280.000	100			17.280.000							
1	4	90	bulan	13.690.000	12	bulan	13.690.000	100			13.690.000				13.690.000			
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																	
2	1	1	bulan	20.810.000	12	bulan	20.810.000	100			20.810.000				5.000.000			

KODE REKENING	URAIAN	RENCANA			OUTPUT				REALISASI				SUMBER DANA			
		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA															
5 2 1	Penanganan Keadaan Darurat	12	bulan	28.003.300	12	bulan	28.003.300						15.303.000			
5 3 1	Penanganan Keadaan Mendesak	12	bulan	236.700.000	12	bulan	236.700.000						236.700.000			12.700.300
	JUMLAH			1.270.019.967			1.250.889.572						861.052.000	312.492.300		79.531.667





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
Jl. Raya Jatjajar Km 7 Telp. (0287) 5566247 Desa Rowokele
ROWOKELE. 54472

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 142 / 3 / KEP / 2021

TENTANG

HASIL EVALUASI PERATURAN DESA JATILUHUR
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATILUHUR KECAMATAN ROWOKELE
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT ROWOKELE,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 perlu di evaluasi agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Peraturan Desa lainnya;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rowokele tentang Hasil Evaluasi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kebumen kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);

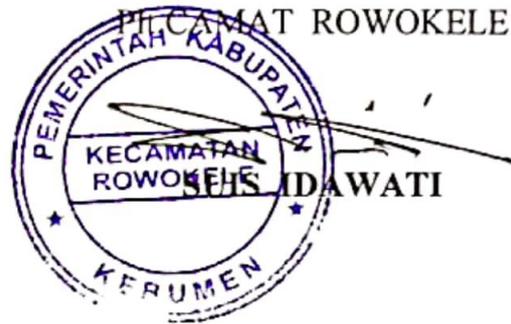
MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Hasil Evaluasi Peraturan Desa Jatiluhur tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen ini berupa Lembar Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.

- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- KETIGA : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rowokele
Pada tanggal : 27 Januari 2021.



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kebumen;
 2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
 6. Kepala Desa Jatiluhur;
 7. Tim Evaluasi yang bersangkutan.
-

**TIM EVALUASI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
2020 KECAMATAN ROWOKELE**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	SUIS IDAWATI, S.Sos.	Ketua	1. 
2.	SRI HASTUTI, S.Sos.	Sekretaris	2. 
3.	SUNARKO	Anggota	3. 
4.	CAHYO AMBAR WAHYUNINGSIH, SH	Anggota	4. 

Rowokele, 27 Januari 2021.

Sekretaris



SRI HASTUTI, S.Sos.

Penata Tk.I.

NIP. 19680311 199703 2 003

Mengetahui

PILICAMAT ROWOKELE



SUIS IDAWATI, S.Sos.

Penbina Tk.I.

NIP. 19670531 198603 2 001

Lembar Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Kabupaten / Kota : Kebumen

Kecamatan : Rowokele

Desa : Jatiluhur

No.	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V		- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, berita acara hasil musyawarah; - APBDes Tahun 2020 - APBDesa Perubahan tahun 2020	Sudah di Lampirkan BA Musyawarah BPD Tgl. 26 Januari 2021.
1.2	Apakah pengajuan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa / harus diajukan kepada Bupati / Wali Kota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa	V		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

1. Penyampaian dokumen evaluasi lengkap sesuai yang terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun 2020
2. Kepatuhan atas Penyajian informasi dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang akan dievaluasi sudah sesuai yang dibutuhkan
3. Penggunaan dokumen dan informasi dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang akan dievaluasi konsisten.
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang akan dievaluasi sudah disesuaikan dengan teknis penyusunan peraturan Desa.

Evaluasi dilakukan tanggal : 27 Januari 2021.

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)

Untuk disetujui Bupati
~~Untuk Diperbaiki Desa~~

Nama

Jabatan

